

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Adji, S. I. (2009). *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kementerian pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Bentham, J. (2016). *Teori Perundang-undangan prinsip-prinsip legislasi, hukum perdata dan hukum pidana*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Frianur. (2013). implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Beraja Niti*, 2 Nomor 9, 15.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. M. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, M. (2017). *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: GENTA.
- Hiariej, O. S. E. (2009). *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Ikhrom, H. A. (2014). Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Hukum*, 1(2).
- Indrati S, F. M. (2016). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Jefisa, T. (2016). Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Lalu Lintas Dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota. *Hukum*, 3(1).
- Maramis, F. (2016). *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mentari, A. R. I., Acara, B. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2015).

PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM.

- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, P. S. H. dan K. I. (2015). *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ruba'i. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti. *Hukum*, 2(2), 1–15.
- Rukmini, M. (2017). *Perlindungan Ham Melalui ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH Dan ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*. Bandung: P.T. Alumni.
- Sibarani, S. (2016). PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR RODA DUA DI WILAYAH POLISI SEKTOR UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU. *FISIP*, 3(2).
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945, 9.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasda.
- Zebua, M. (2017). Prosedur Penindakan Pelanggar Lalu Lintas Dijalan Raya Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Hukum*, 4(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1921.